PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065/0330/ORTAL-C. tanggal 22 Januari 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yang menyangkut keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Februari 2021.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sintang,

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 199003 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
RINGKASAN EKSEKUTIF			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	
		A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	**2**
		B. Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED)	**10**
BAB II	**:**	**PERENCANAAN KINERJA**	
		A. Rencana Strategis Tahun 2017-2021	**14**
		B. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama	**19**
		C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	**20**
BAB III	**:**	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
		A. Capaian Kinerja Organisasi	**26**
		B. Realisasi Anggaran Tahun 2019	**37**
BAB IV	**:**	**PENUTUP**	**52**

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Laporan Kinerja

PENDAHULUAN

A. BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
    3. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan; dan
    2. Seksi Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    1. Seksi Kedaruratan; dan
    2. Seksi Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi; dan
    2. Seksi Rekonstruksi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penannggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud di atas, diangkat seorang Kepala Badan. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Penyusunan program penanggulangan bencana;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengorgadinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;

c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;

f. Pengkoordinasian dalam penyusun laporan BPBD; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 21 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :
   a) Golongan I : -
   b) Golongan II : 7 Orang
   c) Golongan III : 15 Orang
   d) Golongan IV : 2 Orang

2. Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari :
   a) S2 : 3 Orang
   b) S1 : 13 Orang
   c) D3 : 1 Orang
   d) SLTA : 8 Orang
   e) SLTP : -
   f) SD : -

3. Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagai berikut:
   a) Spamen /PIM II : - Orang
   b) Spama/PIM III : 2 Orang
   c) Adum/PIM IV : 2 Orang

4. Dari segi jabatan Struktural /Eselon adalah sebagai berikut :
   a) Eselon II.b : 1 Orang
   b) Eselon III.a : - Orang
   c) Eselon III.b : 3 Orang
   d) Eselon IV.a : 9 Orang

5. Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tenaga kontrak.

Secara keseluruhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

No	**Eselon/Non Eselon**	**Pendidikan**						**Golongan**			
		S2	**S1**	**D3**	**SLTA**	**SLTP**	**SD**	**IV**	**III**	**II**	**I**
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Eselon III	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-
3.	Eselon IV	-	7	1	1	-	-	-	9	-	-
	Sub jumlah	**2**	**9**	**1**	**1**	**-**	**-**	**4**	**9**	-	-
4.	Non Eselon	1	2	-	5	-	-	-	3	5	-
	Jumlah	**3**	**11**	**2**	**6**	**-**	**-**	**4**	**12**	**5**	-

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 dana tersedia untuk mendukung program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.349.816.479,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.276.106.550,00

(sumber dana DAU), berdasarkan dokumen pelaksanaan dan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2020 melalui 10 (Sepuluh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.220.225.085,01 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.349.370.365,00.

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Ruang Kepala Badan

b. Ruang Sekretariat, dibagi menjadi :
   a) Ruangan Sekretaris;
   b) Ruangan Kasubbag Aparatur dan Umum;
   c) Ruangan Kasubbag Perlengkapan dan Aset;

c. Ruang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Pencegahan
   c) Ruangan Kepala Seksi Kesiapsiagaan

b. Ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Kedaruratan
   c) Ruangan Kepala Seksi Logistik

c. Ruang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   a) Ruangan Kepala Bidang
   b) Ruangan Kepala Seksi Rehabilitasi
   c) Ruangan Kepala Seksi Rekonstruksi

d. Gudang untuk logistik dan peralatan
e. Garasi Mobil Operasional dan Pos Jaga

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

a.	Kendaraan Roda Dua	:	13 Unit
b.	Kendaraan Roda Empat	:	3 Unit
c.	Kandaraan Roda Enam	:	1 Unit
d.	Speed Boat	:	3 Unit

2. Meubelair, Peralatan dan Mesin Lainnya

a.	Filling Kabinet	:	4 Unit
b.	Air Conditioner	:	5 Unit
c.	Kipas Angin	:	6 Unit
d.	Mesin Fortable	:	1 Unit
e.	Meja Kerja	:	4 Unit
f.	Kursi Tamu	:	4 Unit
g.	Kursi Rapat	:	3 Unit
h.	Kursi Pejabat	:	7 Unit
i.	Televisi	:	3 Unit
j.	Generating Set	:	1 Unit
k.	Lemari Arsip Besi	:	1 Unit
l.	Lemari Arsip Kayu	:	1 Unit
m.	Kamera	:	4 Unit
n.	Mesin Tebas	:	1 Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Secara internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan *(Strengths)* dan Kelemahan *(Weakneses)* dan secara eksternal memiliki Peluang *(Opportunity)* dan Ancaman *(Threatment).* Identifikasi masalah-masalah di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

1. Adanya dukungan atasan
2. Adanya kerja sama antar bidang
3. Adanya program kerja tahunan
4. Adanya motivasi kerja
5. Adanya uraian tugas

Kelemahan (Weakneses) :

1. Kurangnya Tim Reaksi Cepat yang terlatih
2. Kurangnya dukungan dana
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Belum adanya Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan SOP untuk penanganan darurat bencana.

Peluang (Opportunity) :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan
3. Adanya dukungan dari masyarakat
4. Adanya kerjasama dari instansi terkait
5. Adanya otonomi daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mempunyai beberapa permasalahan utama (*Strategic Issued*) yaitu :

1. Sumber daya aparatur yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi sehingga kelembagaan belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
2. Belum tersusunnya rencana aksi daerah bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang
3. Belum disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana
4. Belum tersedianya peta rawan bencana di 14 kecamatan
5. Adanya berbagai kerusakan akibat bencana yang telah terdata namun belum dapat ditangani secara maksimal
6. Belum optimalnya pengumpulan data daerah rawan bencana

7. Sarana Prasarana penanggulangan bencana belum tercukupi luas wilayah kabupaten
8. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.
9. Dukungan dana terhadap pasca bencana belum optimal
10. Adanya tindakan rasionalisasi dan refocussing dana kebencanaan untuk menghadapi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sintang.

Laporan Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

B. BAB

II

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;
e. strategi dan arah kebijakan;
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

   Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

   Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

   Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

   a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
   b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
   c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2) Sehat

   Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

   Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio

kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
b) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat

waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemda;
c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
d) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan :

Misi 6 (enam) yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih. **Tujuan 3** yaitu Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan **Strategis** yaitu meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang penanggulangan bencana dan **Arah Kebijakan** :
Menyusun regulasi tentang SOP Penanggulangan Bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. **Indikator Kinerja** : (a) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (b) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (c) Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana **Program** : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical success factors).*

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun).
Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

" Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah "

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

"Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah "

Yang dapat diukur melalui :

- Jumlah komunitas masyarakat pada daerah rawan bencana yang di bina
- Jumlah bencana yang ditangani
- Jumlah objek terdampak yang ditangani

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan melalui proses pengganggaran dijabarkan kembali dalam bentuk :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten	Jumlah komunitas Masyarakat pada daerah Rawan Bencana yang dibina	Kecamatan	Output
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan Wilayah Bencana	Jumlah Bencana yang ditangani	Bencana	Output
3.	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Jumlah Objek terdampak yang ditangani	Bencana	Output

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan terget kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran.

Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Selanjutnya perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari unsur pimpinan sampai pelaksana.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sasaran strategis yang dilaksanakan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten	14 Kecamatan
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	35 Bencana
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20 Bencana

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nomor	Program	Kegiatan	
	(3)	(5)	
1.	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
		2	Kegiatan Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana
		4	Kegiatan Identifikasi Penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana

		5	Kegiatan apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla
		6	Kegiatan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
		7	Kegiatan posko penanganan banjir dan karhutla serta kabut asap
		8	Kegiatan posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana
		9	Mapping Aset Dana Hibah/Rekonstruksi Tahun 2017
2.	**Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana non alam**	1	Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bencana Non alam Covid-19
3.	**Program Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan**	1	Kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan karhutla melalui berbagai ragam metode
		2	Kegiatan patroli pencegahan pengendalian karhutla
		3	Kegiatan simulasi mobilisasi berbagai tingkatan
		4	Kegiatan pengembangan sarana prasarana pencegahan pengendalian karhutla
		5	Kegiatan penyebarluasan data dan informasi hotspot
4.	**Program Pengendalian kebakaran hutan**	1	Kegiatan Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
5.	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	1.	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong
6.	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	1.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
7.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

		3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
8.		4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
		5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
		6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		8	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
		9	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
		10	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
		11	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
		12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
		13.	Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasioanal
		2	Kegiatan Pengadaan mebeleur
		3	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer dan printer
		4	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
		5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9.		7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
		8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10.	**Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	1	Kegiatan Penyusunan LAKIP
		2	Kegiatan Penyusunan rencana kerja perangkat daerah
		3	Kegiatan Penyusunan SOP
		4	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

C. BAB III

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, LKJIP dan Tata Review Atas LKJIP, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} \quad \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} \quad \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{} \times 100\%$$

Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi *(ultimate outcomes)* serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	**Penilaian**
85 s.d 100	Sangat Berhasil
70 ≤ x < 85	Berhasil
55 ≤ x < 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan ”Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	**Penilaian**
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (Outcomes).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.
Indikator ouput yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah laporan hasil pelayanan, jumlah aplikasi kependudukan dan laporan kegiatan lainnya. Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan atau prosentase meningkatnya jumlah anggaran pengadaan perangkat pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	**63,77**	-

Dari sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil : -
- Berhasil : -
- Cukup berhasil : 1 Sasaran (63,77%)
- Tidak berhasil : -

Jumlah 1 Sasaran (63,77%)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini.

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD Tahun 2020 sebesar **RP. 6.000.020.810,00** (Anggaran Murni) dan setelah perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar **Rp. 4.864.983.375,00** dan terealisasi **Rp. 2.628.520.665,00** atau **54,03%** dari pagu anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan		Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong	150.321.950,00	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.960.219.400,00	605.509.375,00	604.640.000,00	99,86
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	101.370.000,00	80.590.000,00	70.952.500,00	88,04
	2	Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	95.550.000,00	95.550.000,00	92.223.000,00	96,52
	3	Kegiatan Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana	89.233.000,00	89.233.000,00	88.933.000,00	99,66
	4	Kegiatan Posko Penanganan Banjir dan Karhutla serta Kabut Asap	216.835.000,00	172.835.000,00	120.909.200,00	69,96
	5	Kegiatan Pembuatan Peta Rawan Bencana	20.045.500,00	-	-	
	6	Kegiatan Identifikasi Penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana	100.675.500,00	85.025.500,00	84.598.482,00	99,50
	7	Kegiatan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	45.107.000,00	-	-	
	8	Kegiatan Posko Penanganan Darurat/Tanggap Darurat	891.330.010,00	400.000.000,00	85.265.000,00	21,32
	9	Kegiatan apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla	41.924.100,00	24.539.100,00	19.385.100,00	79,00
	10	Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penanggulangan	315.081.700,00	-	-	
	11	Kegiatan Apel Kesiagaan Terpadu dan Kesiapsiagaan Nasional	50.000.000,00	-	-	
	12	Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	50.000.000,00	-	-	
	13	Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi Tahun 2017	-	67.000.000,00	66.839.000,00	99,76
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana non alam	1	Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bencana Non alam Covid-19	-	1.110.341.100,00	691.415.083,00	62,27
Program Pengendalian kebakaran Hutan	1	Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	69.675.000,00	64.000.000,00	61.435.300,00	95,99
Program Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	1	Kegiatan Penetapan level kesiapsiagaan	117.630.000,00	-	-	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1	Kegiatan Pendirian Posko Lapangan	745.659.000,00	-	-	0,00
	2	Kegiatan Pendirian Posko Pengendalian Karhutla	217.715.650,00	-	-	0,00
	3	Kegiatan Simulasi Mobilisasi Berbagai Tingkatan	249.998.000,00	249.998.000,00	-	0,00
	4	Kegiatan Penyebarluasan Data dan Informasi Hotspot	471.650.000,00	312.550.000,00	-	0,00
	5	Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Karhutla melalui Berbagai Ragam Metode	-	296.719.000,00	20.105.000,00	6,78
	6	Kegiatan Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	-	394.035.000,00	38.820.000,00	9,85
	7	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Karhutla	-	666.736.350,00	433.000.000,00	64,94
Total			**6.000.020.810,00**	**4.864.983.375,00**	**2.628.520.665,00**	**54,03**

Dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019, maka terjadi peningkatan atau penurunan
pada beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	14 Kecamatan	10 Kecamatan	71,42
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	35 Bencana	29 Bencana	82,86
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20 Bencana	5 Bencana	25

Kinerja Sasaran **"Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah"** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	Kecamatan	14	10	71,42%	Output
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	Bencana	35	29	82,86%	Output
3.	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Bencana	20	5	25%	Output
Capaian sasaran (Output)					**63,77%**	**-**

Sedangkan perbandingan indikator kinerja outcome Tahun 2020 dengan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2020
			2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	9 Kecamatan	9 Kecamatan	10 Kecamatan	14 Kecamatan
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	25 Bencana	28 Bencana	29 Bencana	35 Bencana
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	12 Bencana	13 Bencana	5 Bencana	20 Bencana

Dilihat dari capaian indikator yang terdiri dari 3 (tiga) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat di kategorikan **cukup berhasil (63,77%).**

Pada Tahun 2020 ada 2 (dua) indikator yang capaian kinerjanya meningkat dibandingkan Tahun 2018 dan Tahun 2019, sedangkan 1 (satu) indikator terjadi penurunan capaian kinerjanya. Ada pun rinciannya sebagai berikut :

1. Indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kabupaten berupa jumlah wilayah yang terlayani dalam penanggulangan bencana. Target pada Tahun 2020 adalah 14 kecamatan dan terealisasi 10 kecamatan, untuk Tahun 2019 realisasinya 9 kecamatan dan Tahun 2018 realisasinya 9 kecamatan. Terjadinya peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan sudah dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Tahun 2020 yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

2. Indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah bencana berupa jumlah bencana yang ditangani pada saat terjadi bencana di wilayah terjadinya bencana. Target pada Tahun 2020 adalah 35 bencana yang ditangani dan terealisasi 29 bencana, untuk Tahun 2019 realisasinya sebanyak 28

bencana dan Tahun 2018 realisasinya 25 bencana. Terjadinya peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan sudah dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Tahun 2020 yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

3. Indikator kinerja prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berupa jumlah pasca bencana yang ditangani di wilayah terjadinya bencana. Target pada Tahun 2020 adalah 20 bencana yang ditangani dan terealisasi 5 bencana, untuk Tahun 2019 realisasinya sebanyak 13 bencana dan Tahun 2018 realisasinya 12 bencana. Terjadinya penurunan capaian kinerja ini dikarenakan adanya bencana nasional berupa pandemi Covid-19 sehingga terjadinya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mendapat anggaran sebesar Rp. 6.349.370.365,00 untuk Belanja Langsung. Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 4.021.588.779,00, atau sebesar 63,34%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.2.327.781.586,00 atau 36,66%. Adapun uraiannya terdapat dalam tabel berikut ini :

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp.)	REALISASI	%		
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.014.772.600,00	712.645.282,00	70,23	71,42%	29,77%
2.		Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana non alam	1.110.341.100,00	767.930.083,00	69,16	71,42%	30,84%
3.		Program Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	1.920.038.350,00	491.925.000,00	25,62	71,42%	74,62%
4.		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79	25%	0,21%
5.		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	605.509.375,00	604.640.000,00	99,86	25%	0,14%
6.		Program Pengendalian kebakaran hutan	64.000.000,00	61.435.300,00	95,99	82%	4,01%

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang terdapat 10 (sepuluh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang. Dari program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

   Pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam didukung 8 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.1.014.772.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.712.645.282,00 atau 70,23%, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.385.667.318,00 atau 29,77%.

2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Non Alam

   Pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Non Alam didukung 1 kegiatan untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 dan anggaran sebesar Rp.1.110.341.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.767.930.083,00 atau 69,16%, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.418.926.017,00 atau 30,84%.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

   Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan didukung 5 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.1.920.038.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 491.925.000,00 atau 25,62%, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.428.113.350,00 atau 74,62%.

   Anggaran pada program ini bersumber pada Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang sisa anggaran masih bisa dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2021.

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

   Pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didukung 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.150.321.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.000.000,00 atau 99,79%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan didukung 1 kegiatan untuk rehabilitasi beberapa jembatan yang rusak akibat bencana banjir dan anggaran sebesar Rp.605.509.375,00 dan terealisasi sebesar Rp.604.640.000,00 atau 99,86%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung sebanyak 13 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.1.087.786.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.032.296.596,00 atau 94,90%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung sebanyak 8 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.334.732.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 303.479.018,00 atau 90,66%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur didukung sebanyak 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.40.500.000,00 atau 90%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung sebanyak 4 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.16.868.750,00 dan terealisasi sebesar Rp.16.792.500,00 atau 99,55%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

10. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan didukung sebanyak 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.64.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.435.300,00 atau 95,99%, dengan demikian bisa disimpulkan tercapai 100%.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2020
			2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	9 Kecamatan	9 Kecamatan	10 Kecamatan	14 Kecamatan
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	25 Bencana	28 Bencana	29 Bencana	35 Bencana
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	12 Bencana	13 Bencana	5 Bencana	20 Bencana

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Sumber Daya Aparatur dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) yang baru dibentuk pada Tahun 2020 masih kurang terlatih dalam respon penanganan darurat bencana.
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan bencana, sehingga langkah-langkah yang diambil masih kurang terkoordinir dengan baik.
3. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang masih mengacu pada Peraturan-Peraturan Kepala BNPB yang ruang lingkupnya terlalu luas dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi di Wilayah Kabupaten Sintang.
4. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana sebagai acuan penentuan daerah-daerah sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

5. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sintang.
6. Dukungan dana untuk penanganan pasca bencana masih kurang dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum mau pun rumah tinggal yang terdampak bencana.
7. Adanya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini tidak bisa dilaksanakan.
8. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Akan mengikut sertakan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompentensi dalam penanggulangan bencana.
2. Mempersiapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan bencana.
3. Mempersiapkan penyusunan Peraturan Bupati Sintang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Mengoptimalkan pengumpulan data daerah rawan bencana sebagai acuan untuk pembuatan peta rawan bencana
5. Mengusulkan bantuan peralatan kepada BPBD Propinsi dan BNPB
6. Mengusulkan bantuan dana/anggaran untuk penanganan pasca bencana pada BNPB
7. Lebih meningkatkan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasannya

Pengelola keuangan pada Tahun Anggaran 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dari pagu anggaran sebesar **Rp.8.569.595.450,01** terserap sebesar **Rp.6.180.210.642,00** atau **72,12%** dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	Jumlah (Rp)		
	Pagu	Realisasi	%
2	3	4	6
BELANJA DAERAH			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2.220.225.085,01**	**2.158.621.863,00**	**97,23**
Belanja Pegawai	2.220.225.085,01	2.158.621.863,00	97,23
Gaji dan tunjangan	1.625.802.665,01	1.575.676.063,00	96,92
Gaji pokok PNS/uang representasi	1.184.528.842,40	1.181.226.400,00	99,72
Tunjangan keluarga	121.106.171,21	113.367.991,00	93,61
Tunjangan jabatan	152.403.225,00	143.320.000,00	94,04
Tunjangan fungsional	0,00	0,00	0,00
Tunjangan fungsional umum	41.006.000,00	25.650.000,00	62,55
Tunjangan beras	61.583.194,40	56.197.920,00	91,26
Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5.000.000,00	1.270.635,00	25,41
Pembulatan gaji	500.000,00	14.850,00	2,97
Jaminan Kesehatan	49.280.865,00	45.086.335,00	91,49
Jaminan Kematian	7.786.849,00	7.156.440,00	91,90
Jaminan Keselamatan Kerja	2.607.518,00	2.385.492,00	91,49
Tambahan penghasilan PNS	594.422.420,00	582.945.800,00	98,07
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	594.422.420,00	582.945.800,00	98,07
BELANJA LANGSUNG	**6.349.370.365,00**	**4.021.588.779,00**	**63,34**
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	**150.321.950,00**	**150.000.000,00**	**99,79**
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**150.321.950,00**	**150.000.000,00**	**99,79**
Belanja Modal	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**605.509.375,00**	**604.640.000,00**	**99,86**
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	**605.509.375,00**	**604.640.000,00**	**99,86**
Belanja Pegawai	12.570.000,00	12.570.000,00	100,00
Honorarium PNS	12.570.000,00	12.570.000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	592.939.375,00	592.070.000,00	99,85
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	592.939.375,00	592.070.000,00	99,85
Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	592.939.375,00	592.070.000,00	99,85
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	**1.014.772.600,00**	**629.105.282,00**	**61,99**
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	**80.590.000,00**	**70.952.500,00**	**88,04**
Belanja Barang dan Jasa	80.590.000,00	70.952.500,00	88,04
Belanja bahan pakai habis	9.830.000,00	9.212.500,00	93,72
Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	1.615.000,00	85,90
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	5.647.500,00	94,12
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Belanja jasa kantor	18.900.000,00	10.315.000,00	54,58
Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	18.900.000,00	10.315.000,00	54,58
Belanja cetak dan penggandaan	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00

Belanja perjalanan dinas	50.705.000,00	50.270.000,00	99,14
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.705.000,00	50.270.000,00	99,14
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	**95.550.000,00**	**92.223.000,00**	**96,52**
Belanja Barang dan Jasa	95.550.000,00	92.223.000,00	96,52
Belanja perjalanan dinas	11.005.000,00	8.070.000,00	73,33
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.005.000,00	8.070.000,00	73,33
Belanja Bantuan Sosial Barang	84.545.000,00	84.153.000,00	99,54
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	84.545.000,00	84.153.000,00	99,54
Pendataan dan Pemetaan Daerah Potnsi Rawan Bencana	**89.233.000,00**	**88.933.000,00**	**99,66**
Belanja Barang dan Jasa	89.233.000,00	88.933.000,00	99,66
Belanja bahan pakai habis	1.623.000,00	1.623.000,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.623.000,00	1.623.000,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas	85.210.000,00	84.910.000,00	99,65
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.210.000,00	84.910.000,00	99,65
Posko Penanganan Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap	**172.835.000,00**	**120.909.200,00**	**69,96**
Belanja Barang dan Jasa	172.835.000,00	120.909.200,00	69,96
Belanja bahan pakai habis	26.177.000,00	20.509.000,00	78,35
Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.000,00	1.491.000,00	92,67
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	22.200.000,00	17.150.000,00	77,25
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.368.000,00	1.868.000,00	78,89
Belanja bahan / material	2.600.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	2.600.000,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Paket/ Pengiriman	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	4.250.000,00	1.650.000,00	38,82
Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	2.600.000,00	0,00	0,00
Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	10.488.000,00	2.884.200,00	27,50
Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	1.379.400,00	52,61
Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.866.000,00	1.504.800,00	19,13
Belanja perjalanan dinas	129.320.000,00	95.866.000,00	74,13
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.885.000,00	52.045.000,00	98,41
Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.435.000,00	43.821.000,00	57,33
Pembuatan Peta Rawan Bencana	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peta	0,00	0,00	0,00
Identifikasi Penilaian Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	**85.025.500,00**	**84.598.482,00**	**99,50**
Belanja Barang dan Jasa	85.025.500,00	84.598.482,00	99,50
Belanja bahan pakai habis	4.304.000,00	4.304.000,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.354.000,00	2.354.000,00	100,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	1.138.500,00	1.138.500,00	100,00
Belanja Penggandaan	1.138.500,00	1.138.500,00	100,00
Belanja makanan dan minuman	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja makanan dan minuman rapat	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja perjalanan dinas	77.835.000,00	77.483.982,00	99,55

Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.395.000,00	62.080.000,00	99,50
Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.440.000,00	15.403.982,00	99,77
Kajian kebutuhan Pasca Bencana	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Moderator	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan non PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00
Posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana	**400.000.000,00**	**85.265.000,00**	**21,32**
Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	85.265.000,00	21,32
Belanja bahan pakai habis	56.490.660,00	1.725.000,00	3,05
Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.660,00	1.725.000,00	46,68
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	48.450.000,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.185.000,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	4.320.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	4.320.000,00	0,00	0,00
Belanja perawatan kendaraan bermotor	4.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Pelumas	4.000.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	6.006.940,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	3.206.940,00	0,00	0,00
Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	1.300.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	53.192.400,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	5.016.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.176.400,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	61.840.000,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.840.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	129.900.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	26.580.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	103.320.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang	84.250.000,00	83.540.000,00	99,16
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	84.250.000,00	83.540.000,00	99,16
Apel siaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	**24.539.100,00**	**19.385.100,00**	**79,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00

Belanja Barang dan Jasa	24.539.100,00	19.385.100,00	79,00
Belanja bahan pakai habis	4.826.100,00	4.576.100,00	94,82
Belanja Alat Tulis Kantor	826.100,00	826.100,00	100,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	3.750.000,00	93,75
Belanja cetak dan penggandaan	2.290.000,00	2.200.000,00	96,07
Belanja Penggandaan	990.000,00	900.000,00	90,91
Belanja Cetak dan Barang Catakan	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman	17.423.000,00	12.609.000,00	72,37
Belanja makanan dan minuman rapat	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.675.000,00	10.937.000,00	69,77
Perencanaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan penanggulangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	0,00	0,00	0,00
Apel kesiagaan terpadu dan kesiapsiagaan nasional	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi kesiapsiagaan dan metigasi bencana	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Honorarium Moderator	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00

Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitasi / Rekonstruksi Tahun 2017	**67.000.000,00**	**66.839.000,00**	**99,76**
Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	66.839.000,00	99,76
Belanja bahan pakai habis	2.257.000,00	2.257.000,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	1.032.000,00	100,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	330.000,00	330.000,00	100,00
Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja makanan dan minuman rapat	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja perjalanan dinas	62.665.000,00	62.580.000,00	99,86
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.665.000,00	62.580.000,00	99,86
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	**1.110.341.100,00**	**691.415.083,00**	**62,27**
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19	**1.110.341.100,00**	**691.415.083,00**	**62,27**
Belanja Barang dan Jasa	1.108.125.800,00	689.215.083,00	62,20
Belanja bahan pakai habis	171.391.000,00	116.799.703,00	68,15
Belanja Alat Tulis Kantor	6.731.000,00	6.722.000,00	99,87
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.710.000,00	1.380.000,00	80,70
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100.890.000,00	89.107.400,00	88,32
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	46.900.000,00	4.430.303,00	9,45
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	10.900.000,00	9.374.180,00	86,00
Belanja Penggandaan	6.600.000,00	5.724.180,00	86,73
Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	1.300.000,00	650.000,00	50,00
Belanja makanan dan minuman	239.414.800,00	136.651.200,00	57,08
Belanja makanan dan minuman rapat	31.350.000,00	26.644.000,00	84,99
Belanja makanan dan minuman kegiatan	208.064.800,00	110.007.200,00	52,87
Belanja perjalanan dinas	72.720.000,00	64.395.000,00	88,55
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.720.000,00	64.395.000,00	88,55
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	613.700.000,00	361.995.000,00	58,99
Belanja Transportasi	134.640.000,00	111.520.000,00	82,83
Belanja Uang Saku	479.060.000,00	250.475.000,00	52,28
Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	2.215.300,00	2.200.000,00	99,31
Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	2.215.300,00	2.200.000,00	99,31
Belanja modal Pengadaan Meubelair Rumah Tangga	2.215.300,00	2.200.000,00	99,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.087.786.200,00**	**1.032.296.596,00**	**94,90**
Penyediaan jasa surat menyurat	**3.000.000,00**	**2.988.000,00**	**99,60**
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60

Belanja bahan pakai habis	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**52.960.000,00**	**49.323.732,00**	**93,13**
Belanja Barang dan Jasa	52.960.000,00	49.323.732,00	93,13
Belanja jasa kantor	52.960.000,00	49.323.732,00	93,13
Belanja telepon/faksimili/Radio	13.000.000,00	12.513.900,00	96,26
Belanja Listrik	39.960.000,00	36.809.832,00	92,12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	**14.593.000,00**	**1.208.500,00**	**8,28**
Belanja Barang dan Jasa	14.593.000,00	1.208.500,00	8,28
Belanja jasa kantor	14.593.000,00	1.208.500,00	8,28
Belanja Jasa Perizinan	14.593.000,00	1.208.500,00	8,28
Penyediaan jasa administrasi keuangan	**459.000,00**	**76.500,00**	**16,67**
Belanja Barang dan Jasa	459.000,00	76.500,00	16,67
Belanja jasa kantor	459.000,00	76.500,00	16,67
Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	459.000,00	76.500,00	16,67
Penyediaan alat tulis kantor	**69.866.000,00**	**69.155.950,00**	**98,98**
Belanja Barang dan Jasa	69.866.000,00	69.155.950,00	98,98
Belanja bahan pakai habis	69.866.000,00	69.155.950,00	98,98
Belanja Alat Tulis Kantor	43.826.000,00	43.150.950,00	98,46
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	26.040.000,00	26.005.000,00	99,87
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**19.562.250,00**	**19.543.500,00**	**99,90**
Belanja Barang dan Jasa	19.562.250,00	19.543.500,00	99,90
Belanja cetak dan penggandaan	19.562.250,00	19.543.500,00	99,90
Belanja Penggandaan	10.114.500,00	10.098.000,00	99,84
Belanja Cetak dan Barang Catakan	9.447.750,00	9.445.500,00	99,98
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**9.399.900,00**	**9.398.300,00**	**99,98**
Belanja Barang dan Jasa	9.399.900,00	9.398.300,00	99,98
Belanja bahan pakai habis	9.399.900,00	9.398.300,00	99,98
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.399.900,00	9.398.300,00	99,98
Penyediaan makanan dan minuman	**39.660.900,00**	**28.173.200,00**	**71,04**
Belanja Barang dan Jasa	39.660.900,00	28.173.200,00	71,04
Belanja makanan dan minuman	39.660.900,00	28.173.200,00	71,04
Belanja makanan dan minuman rapat	39.660.900,00	28.173.200,00	71,04
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**203.315.000,00**	**192.432.202,00**	**94,65**
Belanja Barang dan Jasa	203.315.000,00	192.432.202,00	94,65
Belanja perjalanan dinas	203.315.000,00	192.432.202,00	94,65
Belanja perjalanan dinas luar daerah	203.315.000,00	192.432.202,00	94,65
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	**187.574.100,00**	**185.448.400,00**	**98,87**
Belanja Barang dan Jasa	187.574.100,00	185.448.400,00	98,87
Belanja perjalanan dinas	187.574.100,00	185.448.400,00	98,87
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	187.574.100,00	185.448.400,00	98,87
Penyediaan tenaga kontrak	**459.495.000,00**	**450.149.412,00**	**97,97**
Belanja Pegawai	459.495.000,00	450.149.412,00	97,97
Honorarium non PNS	416.400.000,00	413.700.000,00	99,35
Gaji Pegawai Tidak Tetap	416.400.000,00	413.700.000,00	99,35
Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	43.095.000,00	36.449.412,00	84,58
Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	39.723.800,00	34.275.912,00	86,29
Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	2.159.200,00	1.207.500,00	55,92
Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	1.212.000,00	966.000,00	79,70
Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	**20.900.000,00**	**17.411.900,00**	**83,31**
Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	17.411.900,00	83,31
Belanja bahan pakai habis	20.900.000,00	17.411.900,00	83,31
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	20.900.000,00	17.411.900,00	83,31

Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	**7.001.050,00**	**6.987.000,00**	**99,80**
Belanja Barang dan Jasa	7.001.050,00	6.987.000,00	99,80
Belanja bahan pakai habis	7.001.050,00	6.987.000,00	99,80
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.001.050,00	6.987.000,00	99,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**334.732.040,00**	**303.479.018,00**	**90,66**
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
Pengadaan mebeleur	**46.415.000,00**	**45.436.250,00**	**97,89**
Belanja Modal	46.415.000,00	45.436.250,00	97,89
Belanja modal pengadaan peralatan kantor	46.415.000,00	45.436.250,00	97,89
Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	46.415.000,00	45.436.250,00	97,89
Pengadaan perangkat komputer dan printer	**138.117.040,00**	**130.900.000,00**	**94,77**
Belanja Modal	138.117.040,00	130.900.000,00	94,77
Belanja modal pengadaan komputer	138.117.040,00	130.900.000,00	94,77
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	138.117.040,00	130.900.000,00	94,77
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	**47.050.000,00**	**43.197.818,00**	**91,81**
Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	6.550.000,00	83,44
Belanja bahan pakai habis	7.850.000,00	6.550.000,00	83,44
Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	7.850.000,00	6.550.000,00	83,44
Belanja Modal	39.200.000,00	36.647.818,00	93,49
Belanja modal pengadaan peralatan kantor	19.700.000,00	19.061.000,00	96,76
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.700.000,00	19.061.000,00	96,76
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	6.636.818,00	78,08
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	2.550.000,00	63,75
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	4.500.000,00	4.086.818,00	90,82
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat studio	11.000.000,00	10.950.000,00	99,55
Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00	10.950.000,00	99,55
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	**76.350.000,00**	**63.375.000,00**	**83,01**
Belanja Barang dan Jasa	76.350.000,00	63.375.000,00	83,01
Belanja perawatan kendaraan bermotor	76.350.000,00	63.375.000,00	83,01
Belanja Jasa Service	23.250.000,00	17.037.000,00	73,28
Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	43.259.000,00	96,13
Belanja Bahan Pelumas	8.100.000,00	3.079.000,00	38,01
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	**8.250.000,00**	**8.250.000,00**	**100,00**
Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	**18.550.000,00**	**12.319.950,00**	**66,41**
Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	12.319.950,00	66,41
Belanja Pemeliharaan	18.550.000,00	12.319.950,00	66,41
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	18.550.000,00	12.319.950,00	66,41
Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**45.000.000,00**	**40.500.000,00**	**90,00**
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	**45.000.000,00**	**40.500.000,00**	**90,00**
Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.500.000,00	90,00
Belanja pakaian dinas dan atributnya	31.500.000,00	29.250.000,00	92,86
Belanja pakaian dinas harian (PDH)	31.500.000,00	29.250.000,00	92,86
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	11.250.000,00	83,33

Belanja pakaian olahraga	13.500.000,00	11.250.000,00	83,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendidikan dan pelatihan formal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Moderator	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Pelatihan teknis operasi peralatan komunikasi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**16.868.750,00**	**16.792.500,00**	**99,55**
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	**3.711.250,00**	**3.711.000,00**	**99,99**
Belanja Barang dan Jasa	3.711.250,00	3.711.000,00	99,99
Belanja bahan pakai habis	1.221.250,00	1.221.000,00	99,98
Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.250,00	1.221.000,00	99,98
Belanja cetak dan penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00

Belanja Penggandaan	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00
Belanja Penjilidan	675.000,00	675.000,00	100,00
Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	**3.741.250,00**	**3.741.250,00**	**100,00**
Belanja Barang dan Jasa	3.741.250,00	3.741.250,00	100,00
Belanja bahan pakai habis	1.221.250,00	1.221.250,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.250,00	1.221.250,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00
Belanja Penggandaan	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00
Belanja Penjilidan	705.000,00	705.000,00	100,00
Penyusunan standard operating procedure (SOP)	**5.459.250,00**	**5.383.250,00**	**98,61**
Belanja Barang dan Jasa	5.459.250,00	5.383.250,00	98,61
Belanja bahan pakai habis	1.221.250,00	1.221.250,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.250,00	1.221.250,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00
Belanja Penggandaan	1.815.000,00	1.815.000,00	100,00
Belanja Penjilidan	675.000,00	675.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja makanan dan minuman rapat	1.748.000,00	1.672.000,00	95,65
Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	**3.957.000,00**	**3.957.000,00**	**100,00**
Belanja Barang dan Jasa	3.957.000,00	3.957.000,00	100,00
Belanja bahan pakai habis	1.227.000,00	1.227.000,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.227.000,00	1.227.000,00	100,00
Belanja cetak dan penggandaan	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00
Belanja Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	100,00
Program Pengendalian kebakaran hutan	**64.000.000,00**	**61.435.300,00**	**95,99**
Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	**64.000.000,00**	**61.435.300,00**	**95,99**
Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	9.900.000,00	83,19
Belanja bahan pakai habis	1.900.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	1.900.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00
Belanja pakaian kerja	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
Belanja Modal	52.100.000,00	51.535.300,00	98,92
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	52.100.000,00	51.535.300,00	98,92
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	52.100.000,00	51.535.300,00	98,92
Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penetapan level kesiapsiagaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan non PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00

Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	**1.920.038.350,00**	**491.925.000,00**	**25,62**
Pendirian posko lapangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tenda	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
Pendirian posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja modal pengadaan komputer	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
Simulasi mobilisasi berbagai tingkatan	**249.998.000,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	18.675.000,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	13.995.000,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	13.995.000,00	0,00	0,00
Honorarium non PNS	4.680.000,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan non PNS	4.680.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	231.323.000,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	24.170.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.950.000,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	3.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	3.250.000,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	16.650.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	16.650.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	4.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	1.650.000,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	2.600.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	46.488.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	10.488.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	59.745.000,00	0,00	0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.340.000,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.405.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	76.770.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	16.170.000,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi	15.600.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	45.000.000,00	0,00	0,00
Penyebarluasan data dan informasi hotspot	**312.550.000,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	114.350.000,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	7.195.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	106.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	106.000.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	1.155.000,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	1.155.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal	198.200.000,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.200.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya	198.200.000,00	0,00	0,00
Sosialisasi dan/atau penyuluhan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode	**296.719.000,00**	**20.105.000,00**	**6,78**
Belanja Barang dan Jasa	296.719.000,00	20.105.000,00	6,78
Belanja bahan pakai habis	21.662.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.662.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	1.350.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	1.350.000,00	0,00	0,00
Belanja jasa kantor	42.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	38.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Moderator	4.500.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	1.650.000,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	1.650.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	36.087.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.776.000,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	135.720.000,00	20.105.000,00	14,81
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	20.105.000,00	23,65
Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.720.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	57.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi	7.700.000,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi	4.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	45.000.000,00	0,00	0,00
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	**394.035.000,00**	**38.820.000,00**	**9,85**
Belanja Pegawai	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00
Honorarium PNS	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	387.465.000,00	32.250.000,00	8,32
Belanja bahan pakai habis	81.555.000,00	7.535.000,00	9,24
Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	7.535.000,00	9,42
Belanja cetak dan penggandaan	990.000,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	990.000,00	0,00	0,00
Belanja perjalanan dinas	304.920.000,00	24.715.000,00	8,11
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	304.920.000,00	24.715.000,00	8,11
Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	**666.736.350,00**	**433.000.000,00**	**64,94**
Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	0,00	0,00

Belanja bahan pakai habis	1.070.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	660.000,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	660.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal	665.006.350,00	433.000.000,00	65,11
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	665.006.350,00	433.000.000,00	65,11
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	175.000.000,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	490.006.350,00	433.000.000,00	88,37
Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pameran pembangunan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Pameran	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Peringatan hari kesiapsiagaan nasional	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Barang Catakan	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	**8.569.595.450,01**	**6.180.210.642,00**	**72,12**
	(8.569.595.450,01)	**(6.180.210.642,00)**	**72,12**

2. Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2020

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk meujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dengan anggaran sebesar **Rp.4.842.428.475,00** dan terealisasi **Rp.2.969.402.178,00** atau **61,32%** dengan kriteria sebagai berikut :

Program	Kegiatan		Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.	Kegiatan pembangunan drainase/gorong-gorong	150.321.950,00	150.321.950,00	150.000.000,00	99,79
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.960.219.400,00	605.509.375,00	604.640.000,00	99,86
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	101.370.000,00	80.590.000,00	70.952.500,00	88,04
	2	Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	95.550.000,00	95.550.000,00	92.223.000,00	96,52
	3	Kegiatan Pendataan dan pemetaan daerah potensi rawan bencana	89.233.000,00	89.233.000,00	88.933.000,00	99,66
	4	Kegiatan Posko Penanganan Banjir dan Karhutla serta Kabut Asap	216.835.000,00	172.835.000,00	120.909.200,00	69,96
	5	Kegiatan Pembuatan Peta Rawan Bencana	20.045.500,00	-	-	
	6	Kegiatan Identifikasi Penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana	100.675.500,00	85.025.500,00	84.598.482,00	99,50
	7	Kegiatan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	45.107.000,00	-	-	
	8	Kegiatan Posko Penanganan Darurat/Tanggap Darurat	891.330.010,00	400.000.000,00	85.265.000,00	21,32
	9	Kegiatan apel siaga pencegahan dan penanggulangan karhutla	41.924.100,00	24.539.100,00	19.385.100,00	79,00
	10	Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penanggulangan	315.081.700,00	-	-	
	11	Kegiatan Apel Kesiagaan Terpadu dan Kesiapsiagaan Nasional	50.000.000,00	-	-	
	12	Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	50.000.000,00	-	-	
	13	Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi Tahun 2017	-	67.000.000,00	66.839.000,00	99,76
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana non alam	1	Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bencana Non alam Covid-19	-	1.110.341.100,00	691.415.083,00	62,27
Program Pengendalian kebakaran Hutan	1	Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	69.675.000,00	64.000.000,00	61.435.300,00	95,99
Program Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	1	Kegiatan Penetapan level kesiapsiagaan	117.630.000,00	-	-	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1	Kegiatan Pendirian Posko Lapangan	745.659.000,00	-	-	0,00
	2	Kegiatan Pendirian Posko Pengendalian Karhutla	217.715.650,00	-	-	0,00
	3	Kegiatan Simulasi Mobilisasi Berbagai Tingkatan	249.998.000,00	249.998.000,00	-	0,00
	4	Kegiatan Penyebarluasan Data dan Informasi Hotspot	471.650.000,00	312.550.000,00	-	0,00
	5	Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Karhutla melalui Berbagai Ragam Metode	-	296.719.000,00	20.105.000,00	6,78
	6	Kegiatan Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	-	394.035.000,00	38.820.000,00	9,85
	7	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Karhutla	-	666.736.350,00	433.000.000,00	64,94
Total			**6.000.020.810,00**	**4.864.983.375,00**	**2.628.520.665,00**	**54,03**

Laporan Kinerja

PENUTUP

D. BAB IV

BAB IV
PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD, Renstra, Renja maupun RKT.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja langkah-langkah outcome, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang capaian kinerjanya dengan kategori Cukup Berhasil. Secara umum keberhasilan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dan kesadaran untuk meningkatkan kinerja dari seluruh Jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk perbaikan kinerja mendatang adalah sebagai berikut :

1. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan daerah maupun pusat guna penambahan alokasi anggaran.
2. Menugaskan aparatur khususnya di bidang kebencanaan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
3. Secara bertahap mengalokasikan anggaran dan mengusulkan ke BNPB untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk penanganan bencana.
4. Meningkatkan fungsi sosialisasi, penyampaian informasi dan edukasi baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan pencegahan dan penanganan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus sebagai instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

ॐ ॐ ॐ

Laporan Kinerja

LAMPIRAN :
Formulir Pengukuran Kinerja

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan bencana kabupaten	14 Kecamatan	10 Kecamatan	71,42
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana	35 Bencana	29 Bencana	82,86
		Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	20 Bencana	5 Bencana	25

Catatan :

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp.4.842.428.475,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp.2.969.402.178.00

Sintang, Februari 2021.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650201 199403 1 009

Dipindai dengan CamScanner